

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini, digunakan analisis yang merupakan pengembangan dari model input output yaitu model Miyazawa. Pemilihan pendekatan ini sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, yaitu aspek keterkaitan antar sektor dalam perekonomian dan distribusi pendapatan rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah.

3.1 Konstruksi Model Miyazawa

Tabel input-output Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2005 menurut harga produsen digunakan sebagai dasar dari pembentukan model Miyazawa. Pengembangan dari tabel input-output dasar menjadi model Miyazawa dilakukan dengan membagi input primer yaitu upah/gaji dan sebagian surplus usaha yang diterima oleh tenaga kerja menjadi tiga kelompok, demikian pula dengan konsumsi rumah tangga yang turut dibagi menjadi tiga kelompok pendapatan. Dengan demikian, dapat dilihat adanya distribusi pendapatan yang terjadi pada ketiga kelompok pendapatan tersebut.

3.1.1 Penyiapan Tabel Dasar

Konstruksi tabel model Miyazawa disusun berdasarkan tabel input-output Sulawesi Tengah tahun 2005. Pada prinsipnya tabel input-output regional Sulawesi Tengah disusun dengan struktur sebagai berikut:

Kuadran I, yaitu kuadran transaksi antar sektor atau permintaan antara yang terdiri dari 50 sektor.

Kuadran II, yaitu kuadran permintaan akhir yang terdiri dari 6 jenis permintaan yaitu konsumsi rumah tangga (C), konsumsi pemerintah (G), pembentukan modal tetap (I), perubahan stok, ekspor (X), dan impor (M).

Kuadran III, yaitu merupakan kuadran yang berisi nilai tambah atau input primer yang terdiri dari upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung.

Selanjutnya sektor-sektor yang berada dalam kuadran I yang sebelumnya berjumlah 50 sektor, diagregasi hingga menjadi tabel input-output dengan matriks 22 x 22 sektor. Agregasi ini disesuaikan dengan data tenaga kerja yang tersedia di Provinsi Sulawesi Tengah dan berpedoman pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Adapun sektor-sektor yang diagregasi tersebut adalah:

- a. Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan merupakan hasil agregasi dari sektor Padi, Jagung, Tanaman Umbi-Umbian, Sayuran dan Buah-buahan, Tanaman Bahan Makanan Lainnya, Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, Coklat, Cengkeh, Tanaman Perkebunan Lainnya, Ternak Sapi dan Kerbau serta hasilnya, Peternakan Lainnya, dan sektor Unggas dan Hasilnya.
- b. Sektor Kehutanan merupakan hasil agregasi dari sektor Kayu, serta sektor Hasil Hutan Lainnya.
- c. Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan hasil agregasi dari sektor Pertambangan Migas, serta sektor Pertambangan Non Migas dan Penggalian.
- d. Sektor Industri Non Makanan merupakan hasil agregasi dari sektor Industri Tekstil, Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan, Industri Kertas dan Barang Cetakan, Industri Pupuk, Industri Semen dan Barang Galian Bukan Logam, Industri Logam Dasar Besi dan Baja, Industri Alat Angkutan Mesin dan Peralatan, Industri Pengilangan Minyak dan Gas Bumi, serta sektor Industri Lainnya.
- e. Sektor Listrik dan Air Bersih merupakan hasil agregasi dari sektor Listrik dan sektor Air Bersih.
- f. Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya merupakan hasil agregasi dari sektor Bank dan sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank.
- g. Sektor Jasa Kemasyarakatan merupakan hasil agregasi dari sektor Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, serta sektor Jasa Kemasyarakatan Lainnya.

Adapun sektor-sektor lainnya, selain yang disebutkan di atas tidak dilakukan agregasi maupun disagregasi. Sektor-sektor tersebut adalah sektor

Perikanan, sektor Industri Makanan dan Minuman, sektor Bangunan/Konstruksi, sektor Perdagangan, sektor Restoran, sektor Hotel, sektor Angkutan Darat, sektor Angkutan Laut, sektor Angkutan Udara, sektor Jasa Penunjang Angkutan dan Pergudangan, sektor Komunikasi, sektor Usaha Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan, sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan, sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan serta sektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga.

Berdasarkan definisi industri pariwisata yang telah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu sebagai kumpulan perusahaan dan kegiatan ekonomi yang kelangsungannya tergantung dari adanya wisatawan yang berkunjung, maka dapat ditentukan bahwa kegiatan inti pariwisata di Sulawesi Tengah tercakup dalam sektor Restoran, sektor Hotel, serta sektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan. Adapun sektor Transportasi, karena tidak didukung oleh data yang lebih rinci dan khusus tentang jasa transportasi wisata maka perannya terhadap pariwisata dalam penelitian ini dapat diabaikan. Pemilihan ketiga sektor di atas, yaitu sektor Restoran, Hotel, serta Jasa Hiburan dan Kebudayaan juga telah sesuai dengan definisi yang terdapat dalam pasal 14 UU No. 10 tahun 2009 tentang jenis usaha yang termasuk dalam kegiatan pariwisata.

3.1.2 Penyusunan Tabel Model Miyazawa

Perubahan dari tabel input-output dasar menjadi tabel model Miyazawa dilakukan dengan melakukan pemecahan terhadap komponen permintaan akhir (konsumsi rumah tangga) serta input primer (upah dan gaji serta sebagian surplus usaha yang diterima oleh tenaga kerja) menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan karakteristik perekonomian Sulawesi Tengah dan ketersediaan data.

3.1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga adalah pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba selama satu tahun yang meliputi konsumsi barang dan jasa baik yang diperoleh dari pihak lain maupun yang diproduksi sendiri, dikurangi nilai bersih penjualan barang bekas dan barang sisa. Pembelian rumah tinggal tidak termasuk kategori konsumsi rumah tangga (BPS, 2008).

Konsumsi rumah tangga pada tabel Miyazawa dimasukkan dalam kuadran I (variabel endogen) karena diasumsikan sebagai salah satu pelaku produksi. Kemudian variabel ini dibagi menjadi tiga kelompok pengeluaran berdasarkan tingkat pendapatan masing-masing golongan rumah tangga. Pembagian kelompok ini menggunakan metode Bank Dunia (World Bank), yaitu dengan membagi jumlah populasi ke dalam tiga kelompok, yaitu 40 persen kelompok pendapatan rendah, 40 persen kelompok pendapatan sedang, dan 20 persen kelompok pendapatan tinggi. Data yang digunakan untuk membagi pengelompokan ini diperoleh dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional modul konsumsi dan pengeluaran tahun 2005 yang dirinci berdasarkan 311 macam komoditas.

Adapun tahapan penyusunan konsumsi rumah tangga sebagai berikut:

- a. Langkah pertama adalah menyusun golongan pendapatan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - Golongan pendapatan rendah < Rp. 400.000
 - Golongan pendapatan sedang Rp. 400.000 s.d Rp. 1.110.200
 - Golongan pendapatan tinggi > Rp. 1.110.200

Penyusunan golongan pendapatan di atas didasarkan pada data pendapatan bersih yang diterima sebulan yang lalu untuk setiap anggota rumah tangga yang bekerja di Sulawesi Tengah.

- b. Langkah kedua adalah memasukkan jenis-jenis pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga dimana pengeluaran untuk makanan (215 komoditas) dan non makanan (96 komoditas) yang telah dibagi berdasarkan golongan pengeluaran ke dalam sektor-sektor yang ada di tabel input-output yang telah diagregasi.
- c. Langkah ketiga adalah menghitung rasio dari masing-masing golongan pengeluaran yang kemudian dikalikan dengan konsumsi rumah tangga (301) pada tabel input-output Sulawesi Tengah tahun 2005 untuk mendapatkan jumlah pengeluaran masing-masing golongan rumah tangga.

3.1.2.2 Input Primer

Dengan bertambahnya kolom pada kuadran I akibat dimasukkannya variabel konsumsi rumah tangga (C) yang telah dibagi menjadi tiga kategori

tersebut sebagai variabel yang endogen, maka jumlah kolomnya bertambah menjadi 25 sektor. Sebagai penyeimbang untuk mendapatkan matriks bujur sangkar, maka komponen yang terdapat dalam input primer yaitu upah dan gaji, serta sebagian dari surplus usaha yang diterima oleh tenaga kerja juga dimasukkan dalam kuadran I dan dibagi dalam tiga kategori.

Asumsi yang digunakan dalam membagi sebagian input primer ini menjadi tiga kategori adalah:

1. Tenaga kerja yang bekerja dalam setiap sektor produksi akan menerima semua balas jasa atas pemakaian faktor-faktor produksi.
2. Tenaga kerja adalah semua orang yang ikut serta dalam proses produksi.

Tahapan penyusunan input primer:

- a. Pada tabel input-output Sulawesi Tengah angka-angka yang terdapat dalam kolom baris 23 – 25 dibentuk dari angka upah dan gaji (201) ditambah sebagian dari surplus usaha (202). Angka-angka tersebut dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\sum_1^{22} S_j^p = \sum_1^{22} C_i - \sum_1^{22} W_j \quad (3.1)$$

$$\sum_1^{22} S_j = \sum_1^{22} S_j^p + \sum_1^{22} S_j^s \quad (3.2)$$

$$R = \frac{\sum S_j^p}{\sum S_j} \quad (3.3)$$

$$S_j^p = R \cdot S_j \quad (3.4)$$

$$C_j = W_j + S_j^p \quad (3.5)$$

dimana:

C_i = konsumsi rumah tangga baris ke-i

C_j = konsumsi rumah tangga kolom ke-j

S_j = surplus usaha kolom ke-j

S_j^p = surplus usaha parsial kolom ke-j

S_j^s = surplus usaha sisa kolom ke-j

W_j = upah dan gaji kolom ke-j

R = Rasio surplus usaha parsial terhadap surplus usaha (202)

3.2 Metode Analisis

Tahapan analisis yang dilakukan yaitu: analisis angka pengganda (pengganda output, pengganda pendapatan dan pengganda tenaga kerja tipe I, II dan Miyazawa), analisis dampak, serta analisis keterkaitan antar sektor (derajat kepekaan dan daya penyebaran).

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini, maka analisis yang dilakukan dibagi menjadi dua bagian yaitu analisis dengan tabel input-output biasa dan analisis dengan menggunakan tabel model Miyazawa.

3.2.1 Analisis Angka Pengganda (*Multiplier Analysis*)

Pada intinya, analisis angka pengganda (*multiplier analysis*) digunakan untuk melihat sesuatu yang terjadi pada variabel-variabel endogen yaitu output sektoral sebagai respon dari perubahan yang terjadi pada variabel-variabel eksogen seperti permintaan akhir (Nazara, 2005). Angka pengganda merupakan ukuran respon terhadap rangsangan perubahan suatu perekonomian (rangsangan berasal dari permintaan akhir) yang dinyatakan dalam hubungan sebab akibat.

a. Angka Pengganda Output (*Output Multiplier*)

Yang dimaksud dengan angka pengganda output pada sektor j adalah nilai total dari output atau produksi yang dihasilkan oleh perekonomian untuk memenuhi (atau akibat) adanya perubahan satu unit uang permintaan akhir sektor j tersebut. Perubahan permintaan akhir sektor j tidak hanya meningkatkan output sektor j tersebut, tetapi akan meningkatkan pula output sektor-sektor lain dalam perekonomian yang tercipta akibat adanya efek langsung dan efek tidak langsung.

Nilai pengganda output total pada masing-masing sektor diperoleh sebagai hasil dari penjumlahan nilai-nilai pada setiap kolom matriks kebalikan Leontief. Hasil penjumlahan itulah yang menjadi nilai pengganda produksi di sektor tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya nilai pengganda mencerminkan besar kecilnya keterkaitan sektor tersebut dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian. Semakin besar nilai pengganda yang dihasilkan

oleh suatu sektor, semakin erat keterkaitan sektor tersebut dengan sektor-sektor lainnya di dalam perekonomian.

Rumus untuk angka pengganda output adalah:

$$O_j = \sum \alpha_{ij} \quad (3.6)$$

dimana:

O_j = *output multiplier* (pengganda output)

α_{ij} = matriks kebalikan Leontif

b. Angka Pengganda Pendapatan (*Income Multiplier*)

Yang dimaksud dengan angka pengganda pendapatan rumah tangga sektor j adalah jumlah pendapatan rumah tangga total yang tercipta akibat adanya tambahan satu unit uang permintaan akhir disektor j tersebut.

Perubahan output dan perubahan pendapatan memiliki hubungan yang linier, sehingga apabila permintaan akhir berubah yang mengakibatkan perubahan output, maka pendapatan pun akan berubah. Hal ini terjadi karena perubahan output mengakibatkan perubahan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga pendapatan rumah tangga yang merupakan balas jasa atas penggunaan faktor produksi tenaga kerja juga berubah. Besar-kecilnya dampak terhadap pendapatan suatu sektor dan sektor-sektor lainnya bergantung pada angka pengganda pendapatan (*income multiplier*). Perhitungan angka pengganda pendapatan dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan model input-output biasa (pengganda tipe I dan II) dan model Miyazawa.

Nilai yang dihasilkan dari angka pengganda pendapatan tipe I didapat dari analisis dengan rumah tangga sebagai faktor eksogen, sedangkan pada angka pengganda pendapatan tipe II konsumsi rumah tangga dimasukkan sebagai faktor endogen. Berbeda dengan angka pengganda pendapatan tipe I dan II, angka pengganda pendapatan model Miyazawa adalah angka pengganda pendapatan total dimana tidak hanya memasukkan dampak langsung dan tidak langsung dari faktor eksogen di dalam analisis namun juga memasukkan efek tambahan yaitu *induced effect* dari masuknya rumah tangga yang dibagi menjadi tiga kelompok pendapatan.

Perhitungan angka pengganda pendapatan tipe I, II, dan model Miyazawa diuraikan sebagai berikut:

- Angka Pengganda Tipe I

$$\frac{\text{Direct+Indirect Income Change}}{\text{Direct Income Change}} = \frac{V(I-A)^{-1}}{V} \quad (3.7)$$

- Angka Pengganda Tipe II dan Model Miyazawa

$$\frac{\text{Direct+Indirect+Induced Income Change}}{\text{Direct Income Change}} = \frac{V(I-A^*)^{-1}}{V} \quad (3.8)$$

dimana;

A^* : matriks koefisien teknologi yang telah diperluas dengan tambahan nilai C rasio pada kolom dan *value added* rasio pada baris.

Pada perhitungan angka pengganda pendapatan tipe II dan model Miyazawa, sebagian dari pendapatan kembali dibelanjakan dalam perekonomian sehingga selain ada pengaruh dari *direct* dan *indirect income* juga terdapat pengaruh *induced income*.

Letak perbedaan antara angka pengganda pendapatan tipe II dan model Miyazawa pada kolom konsumsi rumah tangga yang dimasukkan sebagai *induced effect*. Dalam model Miyazawa kolom konsumsi rumah tangga didekomposisikan menjadi beberapa kelompok pendapatan sesuai dengan tujuan dari penulisan, yaitu untuk melihat distribusi pendapatan terhadap perekonomian Sulawesi Tengah.

c. Angka Pengganda Tenaga Kerja (*Labor Multiplier*)

Angka pengganda tenaga kerja sektor j adalah jumlah penambahan kesempatan kerja total bagi perekonomian yang tercipta akibat adanya tambahan satu unit uang permintaan akhir disektor j tersebut.

Peningkatan permintaan akhir yang mengakibatkan perubahan output juga berakibat pada perubahan kesempatan kerja. Hal ini terjadi karena perubahan

output mengakibatkan perubahan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Besar-kecilnya dampak terhadap kesempatan kerja pada suatu sektor dan sektor-sektor lainnya bergantung pada angka pengganda tenaga kerja (*labor multiplier*). Perhitungan angka pengganda tenaga kerja dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan model input-output biasa (pengganda tipe I dan II) dan model Miyazawa.

Perhitungan angka pengganda pendapatan tipe I, II, dan model Miyazawa diuraikan sebagai berikut:

- Angka Pengganda Tenaga Kerja Tipe I

$$\frac{\text{Direct+Indirect Labor Change}}{\text{Direct Labor Change}} = \frac{L(I-A)^{-1}}{L} \quad (3.9)$$

- Angka Pengganda Tenaga Kerja Tipe II dan Model Miyazawa

$$\frac{\text{Direct+Indirect+Induced Labor Change}}{\text{Direct Labor Change}} = \frac{L(I-A^*)^{-1}}{L} \quad (3.10)$$

dimana;

A^* : matriks koefisien teknologi yang telah diperluas dengan tambahan nilai C rasio pada kolom dan *value added* rasio pada baris.

3.2.2 Analisis Dampak

Salah satu hal yang sangat berguna dalam analisis input-output adalah adanya kemungkinan untuk melakukan analisis dampak. Analisis dampak ini secara umum menggambarkan dampak dari perubahan permintaan akhir terhadap sektor itu sendiri maupun terhadap sektor lain serta terhadap perekonomian secara keseluruhan.

a. Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan

Yang dimaksud dengan pendapatan di sini adalah jumlah *value added* yang telah dikelompokkan menjadi 3 golongan pendapatan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Perumusan yang digunakan adalah:

$$V_n^G = b_{n,j}G \quad (3.11)$$

Universitas Indonesia

dimana:

V_n^G = pendapatan kelompok ke-n akibat dampak pengeluaran pemerintah

n = kelompok pendapatan

b = matriks invers model Miyazawa $[(I-M)^{-1}]$

G = pengeluaran pemerintah

b. Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Analisis dilakukan untuk melihat besarnya penyerapan tenaga kerja yang yang dipengaruhi oleh seluruh permintaan akhir dan pengeluaran pemerintah. Perumusan yang digunakan adalah:

$$L_G = I_{nj}(I - A)^{-1}G \quad (3.12)$$

dimana:

L_G = banyaknya tenaga kerja akibat pengaruh pengeluaran pemerintah

I_{nj} = koefisien tenaga kerja kelompok pendapatan ke-n sektor j

$$= \frac{\text{banyaknya tenaga kerja sektor } j}{\text{input sektor } j}$$

n = kelompok pendapatan

G = pengeluaran pemerintah

3.2.3 Analisis Keterkaitan Antar Sektor

Dalam analisis input-output, tingkat hubungan atau keterkaitan antar sektor produksi dapat dilihat dalam hubungan ke depan dan ke belakang antar sektor produksi. Hubungan ke depan (*forward linkage*) adalah hubungan dengan output atau penjualan barang jadi, baik terhadap permintaan antara maupun permintaan akhir. Sedangkan hubungan ke belakang (*backward linkage*) merupakan hubungan dengan bahan baku atau input serta sarana produksi. Keterkaitan ke depan disebut juga dengan derajat kepekaan sedangkan keterkaitan ke belakang disebut juga dengan daya penyebaran (Rasmussen, 1956).

a. Keterkaitan Ke Depan (*Forward Linkage*)

Jumlah dampak terhadap sektor (i) sebagai akibat perubahan permintaan akhir seluruh sektor dituliskan dalam persamaan berikut:

$$s_j = b_{i1} + b_{i2} + \dots + b_{in} = \sum_j b_{ij} \quad (3.13)$$

Ukuran ini disebut juga dengan keterkaitan ke depan (*forward linkage*). Untuk membandingkan dampak yang terjadi pada setiap sektor, maka harus dilihat besarnya indeks derajat kepekaan sebagai berikut:

$$\beta_j = \frac{1/n \sum_j b_{ij}}{(1/n^2) \sum_i \sum_j b_{ij}} \quad (3.14)$$

dimana;

β_j = Indeks derajat kepekaan sektor (i) atau yang lebih dikenal dengan derajat kepekaan sektor (i).

bila;

$\beta_j = 1$; berarti derajat kepekaan sektor (i) sama dengan rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi

$\beta_j > 1$; menunjukkan derajat kepekaan sektor (i) berada di atas rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi

$\beta_j < 1$; menunjukkan derajat kepekaan sektor (i) lebih rendah dibandingkan derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi.

b. Keterkaitan Ke Belakang (*Backward Linkage*)

Hubungan antara output dan permintaan akhir dijabarkan sebagai $X=(I-A)^{-1}F^d$. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa perubahan 1 unit F_1^d terhadap X_1 akan menimbulkan dampak perubahan sebesar b_{11} , terhadap X_2 sebesar b_{21} , begitu seterusnya. Secara umum jumlah dampak akibat perubahan permintaan suatu sektor terhadap output seluruh sektor perekonomian adalah:

$$r_j = b_{1j} + b_{2j} + \dots + b_{nj} = \sum_i b_{ij} \quad (3.15)$$

dimana:

r_j = jumlah dampak akibat perubahan permintaan akhir sektor (j) terhadap output seluruh sektor.

b_{ij} = dampak yang terjadi terhadap semua output sektor (i) akibat perubahan permintaan sektor (j).

Jumlah dampak (r_j) disebut juga dengan jumlah daya penyebaran. Daya penyebaran merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan ke belakang. Untuk membandingkan dampak yang terjadi pada setiap sektor, maka harus dilihat besarnya indeks daya penyebaran sebagai berikut:

$$\alpha_j = \frac{1/n \sum_i b_{ij}}{(1/n^2) \sum_i \sum_j b_{ij}} \quad (3.16)$$

dimana;

α_j = Indeks daya penyebaran sektor (j) atau yang lebih dikenal dengan daya penyebaran sektor (j).

apabila;

$\alpha_j = 1$; berarti daya penyebaran sektor (j) sama dengan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi

$\alpha_j > 1$; berarti daya penyebaran sektor (j) berada di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi

$\alpha_j < 1$; berarti daya penyebaran sektor (j) lebih rendah dibandingkan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi

3.3 Jenis dan Sumber Data

Beberapa jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Tabel Input Output Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan harga produsen tahun 2005.
- b. Data Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2005, meliputi data antara lain:
 - Konsumsi rumah tangga berdasarkan komoditas
 - Rata-rata pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja
- c. Data Sakernas Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha.
- d. Data APBD Provinsi Sulawesi Tengah

Universitas Indonesia

e. Data kepariwisataan Provinsi Sulawesi Tengah

Data yang diperoleh dari Susenas dan Sakernas digunakan untuk mengkonstruksi tabel model Miyazawa dari tabel input output biasa. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jakarta, Kantor Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan instansi terkait lainnya.



BAB 4
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA DI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

World Economic Forum 2008 dalam laporannya menempatkan Indonesia berada pada peringkat 80 dunia dari 130 negara dalam hal keunggulan daya saing di bidang pariwisata⁵. Secara keseluruhan, peringkat Indonesia masih berada di bawah tiga negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura (16), Malaysia (32), dan Thailand (42) seperti terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Indeks Daya Saing Pariwisata Internasional 2008

Negara	Peringkat	Sub Indeks					
		Kerangka Kebijakan		Lingkungan Bisnis dan Infrastruktur		Sumber Daya	
		Kebijakan dan Regulasi	Keamanan	Infrastruktur Pariwisata	Daya Saing Harga Industri Pariwisata	Manusia (SDM)	Alam (SDA)
1. Swiss	1	23	6	7	118	2	23
2. Austria	2	22	3	1	104	19	37
3. Jerman	3	6	17	18	113	24	30
4. Australia	4	27	21	12	111	14	4
5. Spanyol	5	56	58	1	88	31	32
6. Singapura	16	1	8	43	25	1	98
7. Malaysia	32	12	42	71	3	22	18
8. Thailand	42	52	115	39	11	65	20
9. Indonesia	80	121	108	109	1	34	26
10. Filipina	81	58	113	97	9	61	58

Sumber: The Travel and Tourism Competitiveness Report 2008

Penentuan peringkat ini didasarkan pada indeks daya saing bidang pariwisata yang terdiri dari beberapa kategori. Indonesia unggul dalam kategori harga/biaya pariwisata dimana pada kategori ini Indonesia menduduki peringkat pertama. Keunggulan harga/biaya pariwisata ini diindikasikan oleh rendahnya biaya akomodasi, biaya transportasi yang rendah yang diakibatkan oleh rendahnya harga bahan bakar dan pajak transportasi, serta secara keseluruhan diakibatkan oleh harga-harga barang dalam negeri yang murah. Keunggulan lainnya

⁵ The Travel and Tourism Competitiveness Report 2008 dalam World Economic Forum (2008)

(peringkat ke-26) adalah pada sumber daya alamnya, dimana Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna, kecantikan bentangan alam, dan beberapa situs warisan dunia. Namun, keunggulan tersebut tidak diikuti dengan perbaikan sarana infrastruktur penunjang pariwisata, kebijakan dan regulasi pariwisata serta faktor keamanan bagi wisatawan.

4.1 Gambaran Umum Perekonomian Sulawesi Tengah

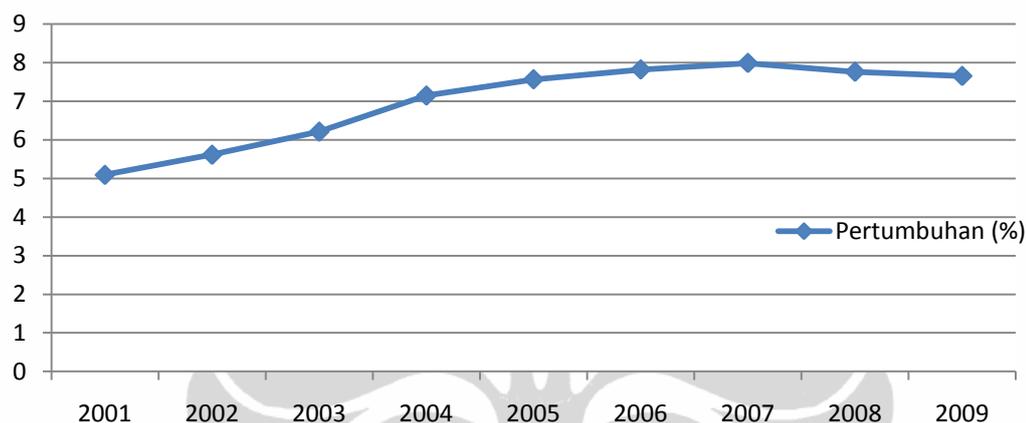
Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki ibukota pemerintahan di kota Palu merupakan salah satu dari enam provinsi yang ada di pulau Sulawesi. Memiliki luas wilayah 189.480 km² (daratan seluas 68.033 km² dan lautan seluas 121.447 km²) sehingga menjadikannya provinsi terluas di pulau Sulawesi. Secara administratif, provinsi ini terbagi menjadi 10 (sepuluh) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya, yaitu Kabupaten Donggala, Sigi Biromaru, Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una, Morowali, Banggai, Banggai Kepulauan, Toli-Toli, Buol, dan Kotamadya Palu. Bagian utara provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Gorontalo dan Laut Sulawesi, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara dan Laut Maluku, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar. Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1964 yang kemudian diperingati sebagai tahun berdirinya provinsi ini.

4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (ADHK 2000) selama periode 2001-2007 terus mengalami peningkatan. Angka pertumbuhannya terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2008 dan 2009 pertumbuhannya mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya (Gambar 4.1).

Jika dilihat dari sisi permintaan, perekonomian Sulawesi Tengah didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tinggi (Tabel 4.2). Pada tahun 2009, *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) yang digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 64.53 persen sementara untuk konsumsi pemerintah dan

investasi masing-masing sebesar 13,31 persen dan 20,72 persen. Semua komponen PDRB berdasarkan penggunaan mengalami pertumbuhan pada tahun 2009 dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh konsumsi rumah tangga (9,49%), disusul konsumsi pemerintah (6,34 persen), investasi (6,30 persen), impor (3,03 persen) dan ekspor (1,41 persen).



Sumber: BPS

Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah 2001 – 2009 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)

Tabel 4.2 PDRB Sulawesi Tengah 2005-2009 Menurut Penggunaan ADHK 2000 (Milyar Rupiah)

Rincian	2005	2006	2007	2008	2009
Konsumsi RT	6.864,96	7.440,16	8.009,50	8.451,57	9.253,22
Konsumsi Lembaga Nirlaba	149,07	161,06	172,20	187,46	204,11
Konsumsi Pemerintah	1.729,81	1.832,18	1.934,24	2.079,25	2.211,00
Investasi (PMTB)	2.245,37	2.420,47	2.689,36	2.943,92	3.113,34
Ekspor	1.904,70	2.016,07	2.159,10	2.377,72	2.410,63
Impor	1.141,68	1.198,39	1.280,52	1.293,89	1.317,62
PDRB	11.752,23	12.671,55	13.683,88	14.746,03	15.874,68

Sumber: BPS

Di sisi penawaran, sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan tiga besar penyumbang teratas terhadap PDRB selama kurun waktu lima tahun terakhir (Tabel 4.3). Pada tahun 2009, seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif dimana tiga besar pertumbuhan tertinggi dicapai sektor listrik, gas dan air minum (11,10%), sektor

pertambangan dan penggalian (10,81%), serta sektor transportasi dan komunikasi (10,12%). Sektor yang paling lambat pertumbuhannya adalah sektor pertanian. Walaupun pertumbuhannya lambat, sektor-sektor yang nilai nominalnya besar masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian walaupun hanya tumbuh 6,31 persen tetapi menyumbang sebesar 2,62 persen bagi angka pertumbuhan sedangkan sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh 10,81 persen hanya menyumbang 0,39 persen bagi angka pertumbuhan.

Tabel 4.3 PDRB Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha (2005-2009)

LAPANGAN USAHA	ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (Milyar Rupiah)				
	2005	2006	2007	2008	2009
1. PERTANIAN	5.291,53	5.579,78	5.855,73	6.128,72	6.515,52
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	244,31	328,29	451,82	537,92	596,05
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	787,11	819,32	886,76	943,30	1.022,93
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	90,38	97,73	103,29	105,38	116,97
5. BANGUNAN	755,07	819,59	902,41	980,08	1.059,45
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1.493,85	1.640,64	1.772,58	1.885,15	2.038,30
a. Perdagangan Besar & Eceran	1.407,10	1.546,37	1.670,61	1.777,95	NA
b. Hotel	24,37	26,58	29,18	30,26	NA
c. Restoran	62,38	67,69	72,78	76,93	NA
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	782,68	889,46	977,50	1.091,01	1.200,71
a. Pengangkutan	737,34	834,85	908,70	1.008,76	NA
b. Komunikasi	45,35	54,61	68,80	82,25	NA
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	529,67	570,89	624,21	691,25	751,31
9. JASA-JASA	1.777,63	1.925,84	2.109,58	2.383,20	2.574,45
a. Pemerintahan Umum	1.206,15	1.278,79	1.400,64	1.613,10	NA
b. Swasta	571,48	647,05	708,95	772,10	NA
1. Sosial Kemasyarakatan	149,07	160,56	172,70	182,46	NA
2. Hiburan & Rekreasi	4,89	5,04	5,37	5,71	NA
3. Perorangan & Rumahtangga	417,52	481,45	530,88	583,94	NA
PDRB DENGAN MIGAS	11.752,23	12.671,55	13.683,88	14.746,03	15.874,68
PDRB TANPA MIGAS	11.710,85	12.556,45	13.467,25	14.490,08	NA

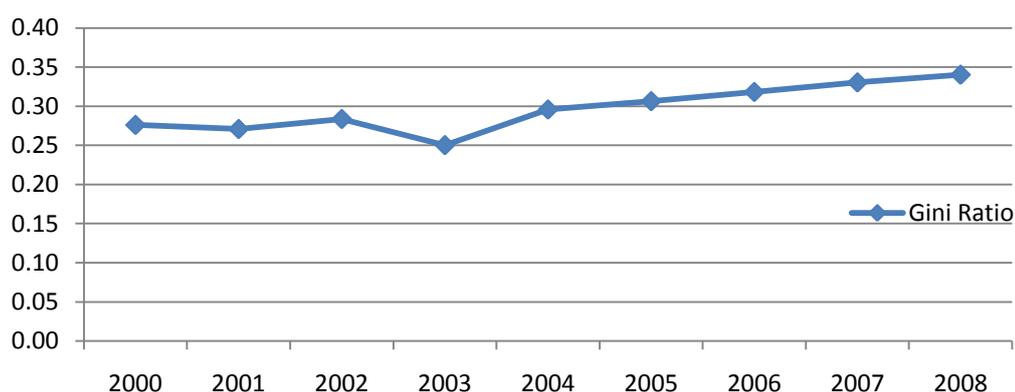
Sumber: 1. BPS (telah diolah kembali)
2. Bank Indonesia (telah diolah kembali)

Pada tahun 2009, PDRB per kapita penduduk Sulawesi Tengah diperkirakan mencapai Rp. 12,92 juta⁶ atau sekitar US\$ 1.248,06 dengan laju pertumbuhan sebesar 11,96% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.1.2 Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membuka lapangan kerja seluasnya sehingga mampu menyerap angkatan kerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga diharapkan menciptakan pendapatan bagi pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membawa dampak positif pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, namun belum tentu dapat dinikmati secara luas dan merata oleh seluruh masyarakat.

Jika diukur menggunakan *Gini Ratio*, tingkat distribusi ketimpangan pendapatan di Sulawesi Tengah memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tidak mampu memperbaiki ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah ini. Pertumbuhan ekonomi justru diiringi peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya angka *Gini Ratio* Sulawesi Tengah untuk periode tahun 2000 sampai dengan 2008 (Gambar 4.2). Secara keseluruhan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Tengah berada pada tingkat yang moderat.



Sumber: BPS

Gambar 4.2 Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Tengah 2000-2008

⁶ Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Tengah No. 05/02/72/Th.XI, 10 Februari 2010

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada tahun 2009 sebanyak 489.940 jiwa atau 18,98 persen dari total jumlah penduduk. Persentase ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang sebesar 20,75 persen (Tabel 4.4). Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin nasional pada tahun 2009 yang sebesar 14,15 persen, terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase nasional. Pada tahun 2009, di Sulawesi Tengah sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan (88,84%). Selain persentasenya yang tinggi, kemiskinan di pedesaan juga memiliki indeks kedalaman dan keparahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan di Sulawesi Tengah (2004-2009)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)				Indeks Kedalaman			Indeks Keparahannya		
	Desa	Kota	Total	% Terhadap Penduduk	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total
2004	415.800	70.500	486.300	21,69	4,73	3,19	4,03	1,37	0,96	1,14
2005	454.300	73.200	527.500	21,80	4,64	2,26	4,18	4,18	0,63	1,20
2006	489.500	76.600	566.100	24,09	7,47	2,71	6,49	6,49	0,72	2,00
2007	490.300	67.100	557.400	22,42	5,08	2,14	4,46	1,60	0,56	1,38
2008	463.770	60.930	524.700	20,75	4,89	2,22	4,33	1,63	0,60	1,41
2009	435.270	54.670	489.940	18,98	4,80	1,40	4,09	1,65	0,31	1,37

Sumber: BPS Sulteng

4.1.3 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2009, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 2.481.192 jiwa⁷ yang terdapat dalam 617.803 rumah tangga atau 4 jiwa dalam setiap rumah tangga. Kepadatan penduduknya mencapai 37 jiwa per km².

⁷ Hasil Proyeksi Jumlah Penduduk, diolah dari Berita Resmi Statistik No.05/02/72/Th.XI, 10 Februari 2010

Jumlah angkatan kerja di Sulawesi Tengah pada tahun 2009 sebanyak 1.215.727 orang, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.196.988 orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 18.739 orang ini mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran sebanyak 727 orang karena yang mampu diserap oleh lapangan pekerjaan hanya sebanyak 18.012 orang. Secara relatif, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 5,45 persen pada Agustus 2008 menjadi 5,43 persen pada Agustus 2009. Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang pada Agustus 2008 mencapai 69,76 persen, turun menjadi 69,27 persen pada Agustus 2009. Sebanyak 59,12 persen angkatan kerja di provinsi ini pada Agustus 2009 diserap oleh sektor pertanian (Tabel 4.5).

Tabel 4.5 Perkembangan Komposisi Pekerja Per Sektor Ekonomi di Sulawesi Tengah (Agustus 2007 – Agustus 2009)

Lapangan Pekerjaan Utama	Agst 2007 (%)	Agst 2008 (%)	Agst 2009 (%)
1. Pertanian	59,60	59,30	59,12
2. Industri	4,50	4,40	3,82
3. Konstruksi	3,80	4,00	3,78
4. Perdagangan, Hotel & Restoran	13,80	13,80	14,04
5. Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	4,10	3,90	3,92
6. Keuangan dan Jasa Perusahaan	0,60	0,50	0,58
7. Jasa Kemasyarakatan	13,00	13,10	13,49
8. Pertambangan, Listrik, Gas, dan Air	0,76	0,91	1,25
Total (%)	100	100	100
Jumlah Pekerja (Orang)	1.083.944	1.131.706	1.149.718

Sumber: 1. BPS (Sulawesi Tengah Dalam Angka 2008, 2009)

2. Bank Indonesia (Kajian Ekonomi Regional Sulawesi Tengah Triwulan IV-2009)

4.1.4 Pengeluaran Pemerintah

Peranan konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah cukup signifikan karena kontribusinya terhadap pembentukan PDRB yang cukup besar. Seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduk, terjadi pula peningkatan penerimaan pemerintah yang pada akhirnya mendukung peningkatan pengeluaran pemerintah. Peningkatan penerimaan pemerintah terjadi

karena basis pajak (pajak langsung dan tidak langsung) semakin besar dan luas akibat meningkatnya pendapatan per kapita. Selama periode 2001-2009 konsumsi pengeluaran pemerintah di Sulawesi Tengah terus mengalami pertumbuhan, namun jika dilihat selama periode tersebut kecenderungan kontribusinya terhadap PDRB semakin menurun (Tabel 4.6).

Tabel 4.6 Pertumbuhan dan Kontribusi Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Sulawesi Tengah 2001-2009

Keterangan	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
PDRB ADHK 2000 (Milyar)	9.089,9	9.600,4	10.196,7	10.925,5	11.752,2	12.671,6	13.683,9	14.746,0	15.874,7
Konsumsi Pemerintah (Milyar)	1.376,5	1.450,0	1.529,3	1.623,7	1.729,8	1.832,2	1.934,2	2.079,3	2.211,0
Pertumbuhan (%)		5,3	5,5	6,2	6,5	5,9	5,6	7,5	6,3
Kontribusi (%)	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,5	14,1	14,1	13,9

Sumber: BPS (telah diolah kembali)

4.2 Gambaran Umum Pariwisata Sulawesi Tengah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan jangka panjang yang dikembangkan di provinsi ini. Potensi wisata alam (hutan, danau, serta laut/pantai) dan wisata budaya yang masih relatif alami dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat apabila dikelola secara profesional dan dengan kehati-hatian.

4.2.1 Potensi Kepariwisataaan

Sulawesi Tengah memiliki jumlah pulau sebanyak 800 buah dengan luas wilayah laut 121.447 km². Panjang garis pantainya 4.013 km sehingga menjadikannya sebagai provinsi yang memiliki bentangan pantai terpanjang di Indonesia saat ini. Di wilayah ini terdapat pula 3 (tiga) kelompok gugusan kepulauan yaitu: (1) Kepulauan Wakai atau biasa disebut juga Kepulauan Togeang di Teluk Tomini, (2) Kepulauan Banggai di Teluk Tolo, dan (3) Kepulauan Menui. Selain gugusan kepulauan tersebut, terdapat pula beberapa pulau besar dan kecil yang berdiri sendiri dan tidak berbentuk gugusan kepulauan. Luasnya

wilayah laut dan banyaknya pulau-pulau di daerah ini juga didukung oleh keberadaan taman laut seperti yang terdapat di Kepulauan Togean, Tanjung Karang, Pulau Pasoso, Kepulauan Banggai, Kepulauan Menui, dan Teluk Palu. Dari sekian banyak potensi taman laut yang ada, baru taman laut di Kepulauan Togean dan di Tanjung Karang saja yang sudah mulai dikelola untuk tujuan pariwisata secara serius.

Karakteristik wilayah Sulawesi Tengah sebagian besar merupakan pegunungan dengan vegetasi hutan yang padat sehingga menjadi tempat hunian bagi satwa dan tumbuhan langka yang dilindungi. Beberapa daerah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional seperti Taman Nasional Lore Lindu dan Taman Nasional Morowali. Di Taman Nasional Lore Lindu terdapat aneka satwa dan tumbuhan endemik sebagai karakteristik khas Pulau Sulawesi. Di dalam kawasan tersebut juga dijumpai ratusan peninggalan purbakala ribuan tahun yang lalu dari Zaman Megalitik yang tersebar di tiga lembah, yaitu di Lembah Napu, Besoa, dan Bada. Sulawesi Tengah juga memiliki 2 (dua) buah danau besar, yaitu Danau Poso dan Danau Lindu, serta 10 (sepuluh) danau-danau kecil lainnya. Hanya Danau Poso saja yang dikembangkan secara serius untuk kegiatan pariwisata.

Selain potensi kekayaan bentangan alam, di Sulawesi Tengah juga terdapat aneka ragam seni budaya yang berasal dari suku atau etnis dengan corak kebudayaan yang berbeda-beda. Terdapat 12 suku atau etnis yang mendiami daerah Sulawesi Tengah dan dari kedua belas suku/etnis tersebut, masih dapat dikelompokkan lagi menjadi sub etnis yang dapat dibedakan karena perbedaan penggunaan bahasa. Keberagaman corak bahasa, tradisi, dan kesenian serta kebudayaan fisik dari etnis-etnis tersebut menjadi potensi pengembangan sektor kebudayaan untuk tujuan pariwisata.

4.2.2 Keadaan Sarana Penunjang Kepariwisata

Data BPS menunjukkan jumlah perusahaan angkutan umum yang beroperasi di provinsi ini pada tahun 2008 sebanyak 1.056 buah, dengan jumlah bis yang beroperasi sebanyak 1.279 unit dengan kapasitas penumpang 16.394 orang. Panjang jalan di provinsi ini mencapai 3.843 km yang terdiri dari jalan

negara sepanjang 1.806 km dan jalan provinsi sepanjang 2.037 km. Dari total panjang jalan yang telah ada, sepanjang 2.377 km berada dalam kondisi baik dan sedang, sedangkan 1.466 km lainnya dalam kondisi rusak. Dalam kurun waktu tahun 2004-2008 hanya terjadi penambahan panjang jalan sepanjang 51 km atau sekitar 1,3 persen. Hal ini menandakan minimnya pembangunan infrastruktur jalan terutama dalam hal penambahan panjang jalan untuk lebih menjangkau daerah-daerah yang masih terisolir.

Di bidang angkutan udara, terdapat 5 bandara yang masing-masing berada di Kota Palu, Kabupaten Poso, Banggai, Toli-Toli dan Buol. Bandara terbesar adalah Bandara Mutiara di Kota Palu. Selama tahun 2008, terjadi penurunan jumlah pesawat yang datang dan berangkat dibanding tahun 2007, namun jumlah penumpang yang diangkut justru mengalami peningkatan sebesar 13,47 persen. Di bidang angkutan laut, kondisi alamnya yang sebagian besar terletak di daerah pantai memungkinkan alat transportasi laut untuk beroperasi dari dan ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di setiap kabupaten. Terdapat 18 pelabuhan yang tersebar di setiap kabupaten dan melayani aktivitas penumpang dan bongkar muat barang.

Jumlah hotel di Sulawesi Tengah pada tahun 2008 tercatat sebanyak 272 buah dengan dua diantaranya adalah hotel berbintang yang hanya terdapat di kota Palu. Persediaan jumlah kamar hotel mencapai 136 kamar dengan 270 tempat tidur pada hotel berbintang, sedangkan hotel non bintang menyediakan 3.174 kamar dengan 5.345 tempat tidur. Dalam kurun waktu tahun 2007-2008 terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja perhotelan sebesar 21 persen yaitu dari 1.300 orang (2007) menjadi 1.573 orang (2008). Hal ini menunjukkan bahwa perhotelan di Sulawesi Tengah cepat menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja di perhotelan ini didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 61,36 persen sedangkan lulusan SLTP sebanyak 25,68 persen (BPS, 2009).

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan pariwisata di Sulawesi Tengah diantaranya: a). Jumlah wisatawan yang berkunjung, b). Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Tingkat Penghunian Tempat Tidur (TPTT), c). Rata-rata Lama Tamu Menginap (RLTM). TPK

Universitas Indonesia

menunjukkan perbandingan jumlah kamar yang terisi dengan kamar yang tersedia, sedangkan TPTT menunjukkan jumlah tempat tidur yang terisi dengan tempat tidur yang tersedia selama bulan tersebut. TPK selama bulan Februari 2010 sebesar 31,36 persen, naik 6,26 persen poin dibanding bulan Januari 2010 sebesar 25,10 persen. TPK hotel bintang sebesar 6,27 persen, naik 6,77 persen poin dibanding bulan Januari 2010, sedangkan TPK hotel melati naik sebesar 6,24 persen poin. TPTT selama bulan Februari 2010 sebesar 24,12 persen, naik sebesar 0,17 persen poin dibanding bulan sebelumnya⁸.

Rata-Rata Lama Tamu Menginap (RLTM) mengindikasikan lama waktu dari tamu yang datang dan menginap di suatu hotel. Selama bulan Februari 2010, RLTM di Sulawesi Tengah sebesar 1,45 hari atau turun sebesar 0,02 hari dibanding bulan sebelumnya. Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang selama bulan Februari 2010 sebesar 3.189 orang, dengan jumlah tamu asing sebanyak 143 orang dan tamu domestik sebanyak 3.046 orang. Jika dibandingkan dengan sebulan sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 535 orang. Jumlah kunjungan tamu asing di Sulawesi Tengah sebanyak 231 orang pada bulan Februari 2010. Sebagian besar dari tamu asing tersebut berasal dari Asia (142 orang), disusul oleh Amerika sebanyak 67 orang dan Eropa 22 orang.

4.2.3 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata

Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah, pemerintah Sulawesi Tengah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan jangka panjang. Adapun sektor unggulan jangka panjang lainnya adalah sektor pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Sebagai salah satu sektor unggulan, pariwisata diharapkan mampu memberikan peran yang berarti bagi pertumbuhan perekonomian daerah, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta mampu membuka seluas-luasnya kesempatan berusaha.

Berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah Tahun 2006/2011 dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Sulawesi

⁸ Berita Resmi Statistik No. 03/04/72/Th.XIII, 1 April 2010

Tengah, pemerintah daerah memetakan kekuatan dan kelemahan dari kepariwisataan di Sulawesi Tengah sebagai berikut:

A. Kekuatan (*Strengths*):

1. Sulawesi Tengah memiliki posisi yang sangat strategis karena diapit oleh dua daerah tujuan wisata yang sudah maju, yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
2. Adanya obyek dan daya tarik wisata dan budaya yang bervariasi, unik, dan sebagian besar masih asli atau alami.
3. Adanya keragaman budaya yang tersebar dalam 12 (duabelas) etnis yang mendiami daerah Sulawesi Tengah.
4. Adanya dukungan pemerintah daerah berupa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk berinvestasi di bidang pariwisata.

B. Kelemahan (*Weaknesses*):

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang profesional di bidang kebudayaan dan pariwisata.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana kepariwisataan.
3. Lemahnya sistem informasi kekayaan budaya dan pariwisata serta belum optimalnya keterpaduan berbagai *stakeholder* dalam pelaksanaan pemasaran produk wisata.
4. Kondisi keamanan yang kurang stabil.

Adapun peluang dan ancaman bagi pengembangan pariwisata di Sulawesi Tengah adalah:

A. Peluang (*Opportunities*):

1. Meningkatnya minat masyarakat internasional dan dalam negeri untuk melakukan perjalanan wisata.
2. Komitmen pemerintah pusat untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber utama devisa negara.
3. Kode etik pariwisata dunia yang membantu proses pelestarian benda peninggalan sejarah dan purbakala.
4. Semakin matangnya kehidupan berdemokrasi yang memberi kesempatan besar bagi seniman dan budayawan dalam menciptakan karyanya.

5. Pemberlakuan otonomi daerah yang dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membangun destinasi pariwisata baru.
6. Kemudahan promosi pariwisata akibat meningkatnya teknologi informasi

B. Ancaman (*Threats*):

1. Persaingan yang semakin tinggi khususnya antar negara ASEAN dalam upaya menarik wisatawan.
2. Kurangnya penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual di bidang kebudayaan.
3. Pengaruh budaya asing yang akan berdampak negatif terhadap ketahanan budaya seperti kemungkinan terjadinya erosi ciri khas dan identitas nilai budaya bangsa.
4. Apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang masih rendah.

Hasil analisis SWOT yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tengah menyimpulkan bahwa fokus akselerasi program pengembangan pariwisata dititikberatkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembenahan dan perbaikan obyek-obyek wisata yang potensial secara ekonomi, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, dan peningkatan program promosi dan pemasaran pariwisata. Selain itu penguatan kapasitas pemerintah juga sangat penting dimana program pengembangan pariwisata ini, kedepannya akan memerlukan keterpaduan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Peningkatan keterpaduan kebijakan tersebut ditempuh melalui:

1. Kerjasama antara pemerintah dan swasta berbasis link and match dalam penyelenggaraan peningkatan apresiasi kebudayaan dan pariwisata serta kualitas SDM aparatur dan mitra usaha di bidang pariwisata.
2. Memperkuat basis data yang diperlukan bagi kajian kelayakan tentang peluang pengembangan obyek wisata dan budaya serta kemitraan sesuai potensi yang ada.
3. Menyusun strategi pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang komprehensif dan mensinergikannya dengan peluang kemitraan usaha.

4. Mendorong kebijakan investasi melalui penerapan pola kemitraan usaha.

Arah kebijakan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan Sulawesi Tengah yang termuat dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu:

1. Pentas dan even budaya sebagai ajang seleksi dan pembinaan budaya daerah sekaligus promosi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
2. Pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan adat dan desa wisata.
3. Peningkatan ketahanan budaya dan citra pariwisata melalui kualitas produk, termasuk kualitas pelayanan agar mampu bersaing di pasar global.
4. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan Daerah (RIPKEDA) dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPPDA) serta Rencana Tata Ruang Kawasan Budaya dan Pariwisata ditindaklanjuti dengan Rencana Detail tata Ruang Kawasan Budaya dan Pariwisata andalan.
5. Pembinaan masyarakat di sekitar obyek wisata dan peningkatan upaya pengelolaan obyek wisata dan situs kepurbakalaan agar lebih menarik dan memiliki daya saing.

Beberapa program kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan.
6. Program Pengembangan Kemitraan.
7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
9. Program Pengembangan Obyek Wisata Unggulan.
10. Program Pemasaran Pariwisata.
11. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Fokus pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Sulawesi Tengah pada tahun 2011 lebih diarahkan pada pelaksanaan program pemasaran pariwisata, program pengelolaan kekayaan budaya, serta program pengembangan obyek wisata unggulan. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya persentase anggaran pemerintah provinsi yang dialokasikan bagi ketiga program tersebut dibandingkan dengan program-program lainnya seperti yang terdapat dalam Renstra dan Renja 2011 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah. Pada tahun 2011, program pemasaran pariwisata memperoleh 27 persen alokasi anggaran, program pengelolaan kekayaan budaya sebesar 25 persen, program pengembangan obyek wisata unggulan sebesar 14 persen, sedangkan sisanya (34 persen) untuk program-program lain yang sifatnya rutin dan administratif.

